

Penerapan Aplikasi E-Kinerja Kuansing Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Kuantan Singingi

Veby Delpianty¹ Eko Handrian²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
vebydelpianty@student.uir.ac.id ekohandrian@soc.uir.ac.id

Received : February 28, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

This objective aims to determine how the Application of the Kuansing E-Performance Application and the obstacles that exist from the Application of the Kuansing E-Performance Application at the Kuantan Singingi Regency DPRD Secretariat. This study uses descriptive survey research type using quantitative using five research indicators are Utilization, Efficiency, Participation, Transparency and Change Management. There is also a population used in this study taken from all civil servants in the Secretariat of the DPRD Kuantan Singingi Regency which amounted to 39 people. There is also a sample withdrawal technique using purposive sampling for all civil servants at the Kuantan Singingi Regency DPRD Secretariat, totaling 39 people. The types and techniques of data collection used in this study consist of primary data and secondary data. Based on data analysis techniques After the data is collected through the data collection techniques used in this study, the data is grouped and processed according to its type and is complemented by descriptions and supporting information, and the results showed that in this study the Application of the Kuansing E – Kinerja Performance Application at the Kuantan Singingi Regency DPRD Secretariat found that there were still three indicators that had a low value, namely the efficiency indicator with a total score off 288, the participation indicator with a total score of 149 and the change management indicator with a total score of 174.

Keywords: Implementation, Kuansing E-Performance Application, DPRD Secretariat

Abstrak

Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Aplikasi E – Kinerja Kuansing serta hambatan – hambatan yang ada dari Penerapan Aplikasi E – Kinerja Kuansing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan menggunakan kuantitatif dengan menggunakan lima indikator penelitian adalah Pemanfaatan, Efisiensi, Partisipasi, Transparansi dan Manajemen Perubahan. Ada pun populasi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari semua pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah sebanyak 39 orang. Ada pun teknik Penarikan sampelnya menggunakan sampling purposive untuk semua pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah sebanyak 39 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Berdasarkan teknik analisis data Setelah data terkumpul melalui Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penelitian ini Penerapan Aplikasi E – Kinerja Kuansing Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan masih adanya tiga indikator yang bernilai rendah yaitu pada indikator efisiensi dengan hasil total skor 288, indikator partisipasi dengan hasil total skor 149 dan indikator manajemen perubahan dengan hasil total skor 174.

Kata Kunci: Penerapan, Aplikasi E – Kinerja Kuansing, Sekretariat DPRD

Pendahuluan

Dunia Birokrasi merupakan suatu sistem susunan aturan yang ada pada pemerintahan dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Birokrasi juga memiliki arti Pengelolaan sistem pemerintahan secara teratur dan terarah dalam suatu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam suatu birokrasi terdapat birokrat menjalankan tugas dan wewenang harus berlandaskan kepada susunan atau aturan dan kesadaran hukum yang tinggi. Adapun ciri-ciri birokrasi yaitu adanya peraturan yang benar – benar ditaati dan dijalankan dengan tanggung jawab, para birokrat harus mempunyai kedisiplinan, para birokrat diangkat berdasarkan syarat – syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedisiplinan sangat perlu untuk meningkatkan citra kerja maupun kinerja pegawai. Kedisiplinan merupakan fungsi yang penting dalam bidang manajemen sumber daya manusia karena kedisiplinan yang tinggi akan menghasilkan seorang pegawai yang tegas dan tepat waktu serta handal. Sehingga akan semakin meningkatkan prestasi yang dihasilkan oleh Aparatur Sipil Negara. Untuk mengetahui disiplin pegawai dapat dilihat dari presentasi kehadiran dikantor,

Aparatur Sipil Negara mempunyai aturan yaitu undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Undang-undnag tersebut Aparatur Sipil Negara terbagi 2 yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK), Selanjutnya di atur juga beberapa jabatan di antaranya jabatan administrator, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Mengenai jabatan ini diatur dalam pasal 131 UU ASN.

Untuk menunjang program pemerintah tersebut di buatlah aplikasi yang bernama E-Kinerja oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara
5. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. PemenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

Aplikasi E-Kinerja adalah sebuah aplikasi berbasis website untuk mengukur kinerja pegawai dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di kabupaten, daerah ataupun kota sesuai dengan peraturan Pemerintahan Indonesia.

Aplikasi E-Kinerja memberikan output nilai Aktivitas Kinerja (AK). Data Aktivitas Kinerja (AK) ini yang akan digunakan sebagai salah satu indikator pembayaran TPP bagi PNS dan ASN. Ada pun capaian aktivitas harian individu (AH1) dan aktivitas harian bawahan langsung dan bawahan dua tingkat (AH2) menjadi tolak ukur kualitas mutu kinerja PNS dan ASN.

Tujuan dari pembuatan sistem aplikasi Elektronik Kinerja (E-KINERJA) pemerintah adalah untuk mempermudah pengelolaan kinerja ASN pada Instansi / Satuan Kerja yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut ntang komitmen terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik; Tujuan dari pembuatan sistem aplikasi Elektronik Kinerja (E-KINERJA) pemerintah adalah untuk mempermudah pengelolaan kinerja ASN pada Instansi / Satuan Kerja yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Absen kehadiran secara elektronik wajib hukumnya, sehingga dengan cepat melalui sistem aplikasi Elektronik Kinerja (E-KINERJA) diperoleh rekap jumlah kehadiran seluruh ASN secara elektronik;
2. Mempercepat rekap kumulatif ketidakhadiran seluruh ASN sesuai dengan kebutuhan per bulanan, per triwulan, per semester, per tahun secara elektronik;
3. Mempermudah melakukan rekap pembayaran uang makan berdasarkan kehadiran para ASN secara elektronik;
4. Mempermudah melakukan rekap pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran para ASN, dan keterangan lainnya secara elektronik;
5. Mempermudah melakukan entry data para ASN untuk membuat laporan kinerja para ASN, serta pimpinan data memonitoring perkembangannya secara elektronik;
6. Mempermudah melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) para ASN secara elektronik;
7. Mempermudah melakukan penilaian prestasi kerja para ASN secara elektronik setiap tahun.
8. Dibuatnya Aplikasi E-Kinerja bertujuan untuk membantu tugas bagian kepegawaian karena rekap jumlah kehadiran dan kumulatif indiscipliner secara otomatis sudah ada. E-Kinerja sangat membantu tugas bagian ortala karena rekap laporan kinerja, rekap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja ASN akhir tahun secara otomatis sudah ada.
9. Aplikasi E-Kinerja sangat membantu tugas Bendahara Pengeluaran dan staff keuangan lainnya pada masing-masing instansi pengguna karena akan terbentuk standarisasi kerja dalam hal pengelolaan keuangan berupa rekap jumlah pembayaran uang makan sesuai kehadiran dan rekap jumlah pembayaran tunjangan kinerja (setelah ada pengurangan dari sistem secara otomatis sudah ada).

Fenomena yang terjadi dalam penerapan Aplikasi E-Kinerja Kuansing ini adalah :

1. Masih adanya menu – menu yang belum bisa di gunakan antara lain menu SKP (sasaran kerja pegawai), Aktivitas harian, aktivitas bawahan.
2. Sasaran Kerja Pegawai dan Laporan Harian Kegiatan belum dapat diakses dalam pembuatan SKP (sasaran kerja pegawai) dan aktivitas harian biasanya pegawai menggunakan lembar word secara manual (diketik).
3. Masih adanya manipulasi dalam absensi pegawai.
4. Belum terlaksananya tujuan dari Aplikasi E-Kinerja.

Tinjauan Pustaka

Menurut Booz Allen dan Hamilton indrajit;2005 terdapat lima dimensi dalam Balanced e-government scorecard sebagai alat ukur kinerja pemerintah yang menerapkan e-government yaitu : (i) manfaat, (ii) efisiensi, (iii) partisipasi, (iv) transparansi, (v) manajemen perubahan.

Jadi untuk mengukur penerapan suatu kegiatan atau suatu program perlu diperhatikan beberapa indikator, dan menurut Allen dan Hamilton indrajit;2005 untuk mengukur penerapan maka dapat digunakan indikator sebagai berikut:

1.Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi suatu yang ada menjadi bermanfaat.

2.Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan yang sering diukur untuk menghindari kesalahan atau pemborosan bahan, energy, tenaga, uang, dan waktu saat melakukan suatu tugas.

3.Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau model dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

4.Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan suatu proses kegiatan.

5.Manajemen perubahan

Manajemen perubahan adalah alat, prosesdan juga teknik untuk mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi.

Metode

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian survei deskriptif dengan bentuk pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif: pada dasarnya metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan pengukuran terhadap masalah yang hendak diteliti dan juga umumnya metode

survei yang mendalam dan dapat mengkaji isu – isu yang luas sehingga melibatkan banyak actor.(Pasolong, 2016:165)

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil pembahasan ini akan dilakukan pemaparan Hasil Penelitian dan dilakukan juga Pembahasan dari Tanggapan Responden dan ada beberapa Indikator yang penulis paparkan dalam Penelitian yang berjudul Efektivitas Penyuluhan Pertanian Oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan penulis juga menggunakan Indikator-indikator dalam mencari hasil penelitian ini sebagai berikut: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata.

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu lebih baik dan lebih bernilai. Manfaat merujuk pada nilai positif atau keuntungan yang diperoleh dari suatu hal atau kegiatan. Ini mencakup dampak positif, kegunaan, atau kontribusi positif yang dapat diperoleh seseorang, kelompok, atau masyarakat dari suatu tindakan atau objek.

Pemanfaatan adalah aktivitas berupa tindakan yang menerima hal-hal yang berguna baik untuk proses sumber belajar secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja kuansing ini dinilai dari 3 sub indikator yaitu

1. Penggunaan aplikasi yaitu terkait penggunaan aplikasi e-kinerja kuansing oleh pegawai Sekretariat DPRD.
2. Kemudahan Akses
adalah cara download aplikasi E-Kinerja Kuansing.
3. Layanan Pengaduan adalah tanggapan atau respon pimpinan terhadap keluhan-keluhan yang terjadi pada penggunaan Aplikasi E-Kinerja Kuansing

2. Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Efisiensi mengacu pada tingkat kinerja atau penggunaan sumber daya yang optimal dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu. Dalam konteks ini, efisiensi mencerminkan kemampuan untuk mencapai output maksimum dengan input yang diberikan, menghindari pemborosan atau penyalahgunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan memekasimalkan hasil dari sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut berhasil dan terlaksana dengan baik. Dalam penerapan aplikasi E-Kinerja Kuansing ada 3 sub indikator dalam indikator efisiensi yaitu 1. ketersediaan menu aplikasi adalah menu apasaja yang terdapat pada aplikasi E-Kinerja dapat di gunakan atau tidak. 2. Pengaruh Aplikasi

maksudnya manfaat dari aplikasi ini terhadap kedisiplinan pegawai. 3.pemanfaatan Fitur Menu adalah fitur menu lain selain absensi dapat digunakan atau tidak.

Dapat diketahui bahwa responden menyatakan pernyataan tentang indikator efisiensi dengan hasil total skor 194. Hal tersebut masuk pada kriteria cukup terlaksana, artinya hampir semua pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi bisa menggunakan Aplikasi E – Kinerja Kuansing.

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil observasi diatas menyimpulkan bahwa efisiensi dalam penggunaan Aplikasi E – Kinerja Kuansing tersebut tidak terlaksana sesuai dengan tujuan dari Aplikasi E – Kinerja Kuansing tersebut. Sehingga perlunya dilakukan evaluasi terkait Aplikasi tersebut. Fitur yang tidak bisa digunakan tersebut adalah fitur aktivitas harian dan sasaran kinerja pegawai (SKP).

3. Partisipasi

Partisipasi adalah tindakan atau proses keterlibatan aktif seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan, organisasi, atau system. Ini mencakup kontribusi, interaksi, atau dukungan yang dapat mempengaruhi atau memperkaya hasil dari suatu situasi atau inisiatif. Partisipasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk sosial, politik, Pendidikan, atau ekonomi.

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dalam indikator partisipasi ada terdapat 2 sub indikator yaitu: Pegawai menggunakan aplikasi adalah jumlah pegawai yang dapat menggunakan aplikasi. Dan Kesadaran Pegawai maksudnya pegawai yang sadar akan kewajibannya seperti kehadiran yang tepat waktu atau kedisiplinan.

Dapat diketahui bahwa responden menyatakan pernyataan tentang indikator partisipasi dengan hasil total skor 149. Hal tersebut masuk pada kriteria cukup terlaksana, artinya hampir semua pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi bisa menggunakan Aplikasi E – Kinerja Kuansing.

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil observasi diatas, dapat memperkuat hasil jawaban responden yang menyatakan cukup terlaksana terhadap pertanyaan pengaruh kedisiplinan pegawai pada penggunaan Aplikasi E – Kinerja Kuansing. Masih adanya peluang atau kelemahan aplikasi tersebut.

4. Transparansi

Transparansi merujuk pada tingkatan keterbukaan, kejelasan, dan keterlibatan informasi atau tindakan. Dalam konteks ini, suatu system atau organisasi dianggap transparan jika informasi yang berkaitan dengan keputusan, kebijakan, atau operasionalnya

dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi mendukung akuntabilitas dan membangun kepercayaan dalam interaksi antara berbagai pihak.

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Hal ini diperlukan agar dapat mengurangi kecurangan – kecurangan yang ada dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan sama halnya seperti Penerapan Aplikasi E- Kinerja Kuansing. Untuk menilai indikator transparansi dibutuhkan 2 sub indikator yaitu: 1. Transparansi Rekap Absensi maksudnya keterbukaan informasi terkait rekap absen pegawai di aplikasi E-Kinerja Kuansing. 2. Transparansi Punishmen adalah keterbukaan jumlah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dan Teguran yang diberikan. Berikutnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini jawaban dari responden terhadap indikator transparansi.

Dapat diketahui bahwa responden menyatakan pernyataan tentang indikator transparansi dengan hasil total skor 204. Hal tersebut masuk pada kriteria terlaksana. Artinya hampir semua pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bisa menggunakan Aplikasi E-Kinerja Kuansing.

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil observasi tersebut adalah

Terlaksana walaupun masih ada kelemahan yang terdapat dalam Aplikasi E – Kinerja Kuansing tersebut seperti yang dikatakan Bapak Andika Putra S.Ip. Hal ini menjadi evaluasi bagi sekretaris DPRD selaku pimpinan sekretariat DPRD melalui kepala bagian umum yang membidangi kepegawaian.

5. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Manajemen perubahan merujuk pada pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola perubahan dalam suatu organisasi. Ini melibatkan identifikasi tujuan perubahan, analisis dampaknya, pengembangan strategi implementasi, dan pengelolaan aspek manusia yang terlibat dalam proses perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diterima dan diadopsi dengan efektif oleh anggota organisasi.

Manajemen perubahan adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi sebuah kegiatan dan aplikasi. Tujuan dari indikator manajemen perubahan ini adalah untuk melakukan pengembangan serta evaluasi terhadap kegiatan dan aplikasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan observasi terkait penerapan Aplikasi E – Kinerja yang salah satu indikatornya adalah manajemen perubahan. Dalam hal indikator tersebut ada 3 sub indikator yang menjadi acuan penilaian terhadap manajemen perubahan yaitu: 1. Pengembangan Aplikasi maksudnya aplikasi tersebut sudah ada pembaharuan atau belum. 2. Kualitas Kontrol Aplikasi adalah peran pimpinan Sekretarian DPRD dalam melakukan pembimbingan dan pengecekan kehadiran pegawai hingga kendala yang ada pada aplikasi

E-Kinerja Kuansing. 3.Keterlibatan Sekretaris DPRD maksudnya apakah Sekretaris DPRD ada melakukan terkait pengembangan Aplikasi E-Kinerja.

Dapat diketahui bahwa responden menyatakan pernyataan tentang indikator manajemen perubahan dengan hasil total skor 194. Hal tersebut masuk pada kriteria tidak terlaksana. Artinya hampir semua pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memahami penggunaan Aplikasi E-Kinerja Kuansing.

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil observasi yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa tidak terlaksana indikator manajemen perubahan pada Aplikasi E – Kinerja Kuansing. Hal ini dibuktikan dari banyaknya responden yang menyatakan tidak ada pengembangan Aplikasi E – Kinerja Kuansing dan kurangnya kontrol dari kepala bagian umum yang membidangi kepegawaian.

Tabel I.1 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi

| No | Indikator | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| | | Terlaksana | Cukup Terlaksana | Tidak Terlaksana | |
| 1. | Pemanfaatan | 70 | 31 | 16 | 288 |
| 2. | Efisiensi | 33 | 11 | 73 | 194 |
| 3. | Partisipasi | 33 | 5 | 40 | 149 |
| 4. | Transparansi | 53 | 20 | 5 | 204 |
| 5. | Manajemen Perubahan | 17 | 15 | 75 | 174 |
| Jumlah | | 206 | 82 | 209 | 1.009 |
| Rata – rata | | 41,2 | 16,4 | 41,8 | 201,8 |
| Kategori | | Terlaksana | | | |

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang menjelaskan hasil rekapitulasi akhir jawaban dari responden pegawai negeri sipil sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 39 pegawai dengan rata – rata jumlah total skor 201,8 masuk dalam kategori terlaksana.

Dari keseluruhan hasil penelitian diatas maka dapat ditemukan bahwa jawaban yang menyatakan penelitian ini mendapatkan kesimpulan “Terlaksana”, jadi penulis dapat memberikan analisis yang menyatakan Penerapan Aplikasi E – Kinerja Kuansing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah terlaksana dan dijalankan dengan baik terlihat bahwa dari lapangan atau hasil observasi pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mampu menerapkan Aplikasi Absensi tersebut.

menerapkan Aplikasi Absensi tersebut.

Hambatan-hambatan pada penerapan Aplikasi E-Kinerja Kuansing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi

Dari analisis data yang dilakukan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi pada penerapan aplikasi E-Kinerja Kuansing di sekretariat DPRD kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

- Hambatan dalam penggunaan aplikasi yaitu Berdasarkan hasil kuisisioner yang diberikan, ada beberapa responden menjawab dengan Cukup Terlaksana dan Tidak Terlaksana, hal ini dikarenakan aplikasi ini hanya biasa digunakan untuk handphone berbasis android.
- Hambatan dalam kemudahan akses yaitu Berdasarkan kuisisioner, ada yang menjawab Tidak Terlaksana karena hanya aplikasi ini untuk handphone android saja dan yang mempunyai handphone iphone tidak bisa, sehingga pegawai meminjam handphone temannya yang android dengan fitur meminjamkan.
- Hambatan dalam layanan pengaduan yaitu Dari hasil data dan wawancara yang dilaksanakan banyak yang menjawab cukup terlaksana dikarenakan kurangnya respon dari atasan terkait keluhan terhadap aplikasi seperti radius absensi dan errornya aplikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner tentang Penerapan Aplikasi E – Kinerja Kuansing Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Dari jawaban responden dengan jumlah 39 orang tentang penerapan Aplikasi E-Kinerja Kuansing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 5 indikator, ada 2 indikator dengan penilaian terlaksana yaitu indikator Transparansi dengan total skor 204 dan indikator Pemanfaatan dengan total skor 288 selanjutnya ada 3 indikator yang bernilai rendah yaitu indikator efisiensi dengan hasil total skor 194, indikator partisipasi dengan hasil total skor 149 dan indikator manajemen perubahan dengan hasil total skor 174 sehingga masih banyaknya diperlukan evaluasi terkait penerapan aplikasi E-Kinerja Kuansing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

Penerapan aplikasi E-Kinerja Kuansing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi, diantaranya adalah faktor

Jaringan yang masih kurang bagus, sehingga masih adaterjadinya error pada aplikasi. selanjutnya pengembangan aplikasi yang belum optimal, dari beberapa fitur yang ada hanya satu fitur yang dapat digunakan dan masih ada kelemahan yang terjadi pada fitur absensi seperti fitur meminjamkan yang belum dapat di kontrol dengan baik oleh operator serta sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pimpinan di instansi tersebut.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Maksudi, Beddy, Iriawan. 2017. Dasar – Dasar Administrasi Publik. Depok: Rajawali Pers
- Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: alfabeta
- Pasolong, H. (2018). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Anggara, s. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung. Pustaka setia.
- Zulkifli, & Yogya, Moris, Adid. 2014. Fungsi – fungsi Manajemen. Pekanbaru: marpoyan Tujuh Publishing
- Maksudi, b. i. (2018). Dasar – dasar Administrasi Publik. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. (2015). Filsafat Administrasi. Edisi Revisi. Cet. 8. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Adidi Yogya, Moris. 2014. Tinjauan teori kebijakan public Implementasi Kebijakan Perkebunan. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.
- Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Indrajit, Richardus Eko (2004). E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:Andi Offset.
- Suaedi, Falih Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). 2010. Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibawa, Samodra. 2009. Administrasi Negara; Isu- isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indrajit, Richardus Eko (2005). E-Government in action. Yogyakarta:Andi Offset
- Rahayu, Amy Y.S., Juwono, Vishnu., dan Rahmayanti, KriSNA Puji. (2020), Pelayanan Publik dan E-Government; sebuah teori dan konsep, Jakarta: Rajawali Press.
- Gaol, Jimmy L. 2014. A to Z Human Capital: Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.
- Suwatno & Priansa, D. 2001. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Reflika Diatama.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional

Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai

Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.

- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota

pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.

- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.

- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.

- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnmp Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangani Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.

- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Priansa, Donni Juni. 2014. Perencanaan & Pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar – dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Miftah Thoha. 2002. Perilaku Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D. Cet. 24. Bandung: Alfabeta
- Eddy Satriya. 2009. "Electronic Government", Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika, BAPPENAS. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 dari www.widyatama.ac.id
- Zweers, K & Planque, K. 2001. Electronic Government
- . From an Organizational Based Perspective Toward a Client-Oriented Approach. In J.E.J Prince (Ed), *Designing E-Government: On the Crossroads of Techonological Innovation and Institutional Change*. The Hague, The Netherlands:Kluwer Law Internasional.